

ABSTRAK

Sebuah fasilitas kesejahteraan sosial yang disebut panti asuhan bertugas memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak yang tidak memiliki keluarga atau orang tua yang dapat merawatnya. Anak-anak ini menerima penggantian atau pengasuhan pengganti dari lembaga ini untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial mereka dan memberi mereka berbagai kemungkinan yang sesuai dan luas untuk pengembangan kepribadian. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini mengenai pelaksanaan perjanjian penitipan anak dan akibat hukum dari perjanjian yang dilakukan di Panti Asuhan Elim HKBP Pematangsiantar, dan penyelesaian sengketa dalam perjanjian penitipan anak di Panti Asuhan Elim HKBP Pematangsiantar.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis dan metode analisis data yang bersifat kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder.

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa perjanjian penitipan anak yang dilakukan oleh Panti Asuhan Elim HKBP Pematangsiantar memiliki beberapa tahapan dan persyaratan yang harus dijalankan oleh pihak orang tua. Sehingga setelah persyaratan dilengkapi maka akan dilakukan pelaksanaan perjanjian penitipan anak yang dilakukan di Panti Asuhan Elim HKBP Pematangsiantar, sehingga menimbulkan akibat hukum dari pelaksanaan perjanjian penitipan anak yang dilakukan di Panti Asuhan Elim HKBP Pematangsiantar yang berupa hak dan kewajiban dari pihak panti asuhan, orang tua dari anak asuh dan juga anak asuh yang tinggal di panti tersebut serta penyelesaian sengketa dalam perjanjian penitipan anak di Panti Asuhan Elim HKBP Pematangsiantar yang dimana penyelesaian secara kekeluargaan untuk mencari yang terbaik bagi kepentingan anak tersebut.

Hendaknya Panti Asuhan Elim HKBP Pematangsiantar akan lebih baik lagi kedepannya dan tidak puas dengan pelayanan yang seperti sekarang sehingga lebih inovatif dan kreatif dalam mengembangkan layanan serta lebih memberikan keterangan yang tegas dalam penyelesaian wanprestasi agar memberikan jaminan lebih ke para pihak.

Kata Kunci: Perjanjian, Penitipan Anak, Panti Asuhan

ABSTRACT

A social welfare facility called an orphanage is in charge of providing social welfare services to children who do not have a family or parents who can take care of them. These children receive substitute or surrogate nurturing from these institutions to meet their physical, mental, and social needs and provide them with a suitable and broad range of possibilities for personality development. The issues discussed in this thesis are regarding the implementation of the child care agreement and the legal consequences of the agreement carried out at the Elim HKBP Pematangsiantar Orphanage, and dispute resolution in the child care agreement at the Elim HKBP Pematangsiantar Orphanage.

This research was conducted using an empirical juridical approach method that uses descriptive analytical research specifications and qualitative data analysis methods with primary and secondary data sources.

This studies concludes that the child care agreement carried out by the Elim HKBP Pematangsiantar Orphanage has several stages and requirements that must be carried out by parents. So that after the requirements are completed, the implementation of the child care agreement will be carried out at the Elim HKBP Pematangsiantar Orphanage, thus causing legal consequences from the implementation of the child care agreement carried out at the Elim HKBP Pematangsiantar Orphanage in the form of rights and obligations of the orphanage, parents of foster children and also foster children living in the orphanage and dispute resolution in child care agreement at Elim Orphanage HKBP Pematangsiantar which is a family settlement to find the best for the interests of the child.

Elim HKBP Pematangsiantar Orphanage should be even better in the future and not satisfied with services like now so that they are more innovative and creative in developing services and provide more firm information in resolving defaults in order to provide more guarantees to the parties.

Keywords: Agreement, Childcare, Orphanage